



Radar Bali

Duh,

Hotel Minta Pengurangan PHR

Tingkat Hunian Tinggi, Mulyadi Bingung

SINGARAJA - Sejumlah hotel di Kabupaten Buleleng rupanya mengajukan permohonan pengurangan pembayaran pajak hotel dan restoran (PHR) kepada pemerintah. Pemerintah pun memberikan isyarat menolak permohonan itu, lantaran pemerintah tak memiliki kewenangan mengabulkan permintaan itu.

Tak tanggung-tanggung, permohonan pengurangan PHR itu diperkirakan mencapai Rp 700 juta. Permohonan pengurangan pajak itu disampaikan kepada pemerintah beberapa bulan lalu. Permohonan itu juga masuk ke meja dewan. Namun dewan meminta pemerintah menolak permohonan tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Buleleng, H. Mulyadi yang ditemui Kamis (12/11) siang kemarin, mengakui ada beberapa hotel di wilayah Kecamatan Gerokgak yang mengajukan permohonan itu. Mulyadi mengaku heran karena hotel yang mengajukan permohonan pengurangan pajak itu memiliki tingkat hunian yang tinggi.

"Kami heran kenapa mereka mengajukan permohonan seperti itu. Kami ingin pemerintah menolaknya. Kalau sampai minta pengurangan pajak, itu aneh. Karena tingkat hunian mereka tinggi. Lagipula pajak itu kan dibayar konsumen, bukan hotel itu sendiri," kata Mulyadi.

Kepala Dinas Pendapatan Buleleng Ida Bagus Puja Erawan yang ditemui terpisah, membenarkan ada beberapa hotel yang mengajukan pen-

gurangan pajak, atau istilahnya mengajukan retitusi PHR. Puja Erawan mengatakan, dari total Rp 2 miliar PHR yang kurang bayar, beberapa hotel mengajukan retitusi dengan nilai sekitar Rp 700 juta.

Puja Erawan menegaskan

tidak tetap memberikan peluang kepada wajib pajak itu melakukan pembayaran kepada pemerintah dengan sistem mencicil. "Peluang yang bisa kami berikan ya hanya itu. Mencicil saja. Kalau mengurangi, apalagi menghapuskan, itu justru pemerintah yang salah," imbuhnya.

Nantinya Dispenda

mengklaim akan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengelola hotel dan restoran. Agar kedepannya mereka disiplin melakukan penyetoran pajak kepada daerah. Mengingat pajak yang dibayar konsumen dan dititipkan kepada hotel atau restoran, tetap harus disetorkan pada pemerintah. (eps/gup)

Edisi : Jumat, 13 November 2015

Hal : 29



Harus Rutin Evaluasi PHR Online



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

TAK SEBANDING: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara di Denpasar belum sebanding dengan pendapatan sektor PHR lantaran terjadinya kebocoran.

Untuk Mencegah Kebocoran PHR

DENPASAR - Tingginya kebocoran Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Kota Denpasar, membuat gerah banyak kalangan. Karena itu Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di desak rutin melakukan evaluasi terhadap penerapan program sistem PHR online. Hal tersebut dimaksudkan agar realisasi PHR yang sudah ditarget tidak meleset.

Desakan tersebut dilontarkan pengamat ekonomi, Gusti Mur-

jana Yasa, kepada koran ini, kemarin. Ia mengatakan, penerapan PHR online ini memang berkaitan dengan tren kunjungan wisatawan di Kota Denpasar. Namun ia menyarankan agar sesering mungkin dilakukan evaluasi untuk langkah maksimalisasi penerimaan atas PHR.

Hal ini menurutnya juga berkaitan dengan peningkatan infrastruktur yang telah dilakukan Pemkot Denpasar sebagai penunjang daya tarik wisata. "Ini sebenarnya jadi contoh bagi daerah yang lain juga untuk mencegah kebocoran pajak. Ini positif sekali dalam rangka meningkatkan PAD di daerah.



Radar Bali

Sambungan - - -

Kalau infrastruktur pariwisata sudah bagus, lalu penerimaan PHR rendah, ini yang menjadi persoalan, sehingga secara dini harus diantisipasi dengan melakukan evaluasi, tegasnya, saat dihubungi, Kamis kemarin (12/11).

Menurut Murjana Yasa, Pemkot Denpasar juga harus lebih teliti dan tentunya harus setiap saat dilakukan evaluasi, karena jangan sampai hotel dan restoran justru bermain dalam hal pajak.

"Kalau sudah benar-benar dilaksanakan PHR online ini, akurasi perhitungan penerimaan daerah

atas PHR lebih bagus. Dan yang terpenting pemkot bisa mudah menentukan target PHR setiap tahunnya," pungkas dosen Universitas Udayana ini.

Sementara, dihubungi terpisah Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Denpasar Dewa Nyoman Sumadi mengungkapkan, sistem yang

sejatinya telah diujicobakan sejak Mei 2015 lalu ini terus dievaluasi untuk memudahkan pengawasan dan meningkatkan pemasukan daerah dan mengurangi tingkat kebocoran.

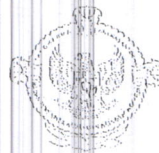
"Sistem kami masih dalam tahap uji coba dan penyempurnaan-penyempurnaan. Sistem ini dilakukan bekerjasama dengan

pihak Bank BPD Bali," ujarnya.

Dikatakan Nyoman Semadi, penerapan PHR online ini dengan perangkat yang akan disiapkan oleh pihak BPD Bali. Dan hingga saat ini koordinasi dan komunikasi dengan Bank BPD Bali masih tetap dilakukan lewat uji coba dengan penerapan sistem yang lebih baik lagi.

Lebih lanjut, Dewa Semadhi mengatakan, langkah evaluasi sistem PHR Online tersebut wajib dilakukan, guna melihat berhasil dan tidaknya program yang diluncurkan tersebut.

"Namun sudah ada manfaatnya, walaupun masih terjadi kebocoran, namun progressnya sudah jelas," akunya. (hen/rid)



KORUPSI

Pelimpahan Astawa Tunggu BPKP

AMLAPURA - Bendahara non aktif Desa Adat Tauka, Kecamatan Abang, Karangasem, I Gede Astawa, nampaknya bakal memperpanjang hidupnya di balik jeruji besi Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Karangasem. Pasalnya, dugaan kasus korupsi yang ditangani Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Karangasem, itu tinggal menunggu hasil audit resmi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah hasil audit itu turun, berkas dugaan korupsi itu bakal segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura. Hal tersebut diakui Kasat Reskrim Polres Karangasem, AKP Noor Maghantara, dihubungi Kamis (12/11). "Iya, setelah ada hasil audit PBKP, baru bisa dilimpahkan," tegas Noor Maghantara.

Sebagaimana diketahui, Astawa yang dililit kasus dugaan korupsi, sudah mendekam di jeruji besi Lapas Karangasem karena kasus penggelapan uang di Desa Adat Tauka. Dia divonis penjara 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Amlapura, pada tahun 2014 lalu. Setelah diselidiki, perbuatan Astawa ternyata ada dugaan merugikan keuangan negara, sehingga ditangani Unit Tipikor. Sedangkan kasus penggelapan yang membawa Astawa ke jeruji besi, ditangani Polsek Abang. "Sekarang belum bebas, sudah ada kasus korupsi," jelas Kanit Tipikor Polres Karangasem, Iptu Agus Wicaksana. Dari hasil pengembangan polisi, Astawa diduga melakukan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Provinsi Bali, dan Kabupaten Karangasem, yang masuk ke desanya, tahun 2011-2013. "Nanti hasil audit BPKP-nya kita tunggu saja," sarannya. (wan/gup)



Paving Gajah Mada Cuma Setahun

Vonis Dua Terdakwa di Pengadilan Tipikor Kemarin

DENPASAR -Dua terdakwa kasus korupsi paving jalan Gajah Mada, Denpasar, Alit Widhiadnyana AS sebagai Direktur PT Alit Wirajaya dan Ngurah Kosala Cakrawerthi Direktur CV Unika Design sebagai konsultan pengawas, akhirnya divonis. Kasus korupsi ini memasuki babak akhir, dan dua terdakwa ini divonis hanya setahun penjara atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang 1,5 tahun.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Ahmad Peten Sili, beserta Hakim Anggota Beslin Sihombing dan Nurbaya. Jaksa yang hadir dalam sidang ini, Jaksa Erawati Susina dan Putu Agus Adnyana Putra. Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa, memastikan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KHUP.

Dari vonis hakim, antara dua terdakwa ada yang berbeda. Memang, majelis hakim menghukum kedua terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara. "Menghukum terdakwa, dengan hukuman 1 tahun penjara," ungkap Hakim Kamis kemarin di Pengadilan Tipikor.

Selain itu mereka juga didenda Rp 50 juta subsider 1 bulan. Artinya jika tidak membayar denda, hukuman ditambah 1 bulan. Yang tidak sama adalah, terdakwa Ngurah Kosala tidak ikut mengembalikan kerugian negara. Yang dibebankan pengembalian kerugian negara adalah Alit Widhiadnyana sebesar Rp 193 juta lebih, dengan ketentu-



Sambungan - - -



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

**PUTUSAN
RINGAN:**
Alit
Widhiad-
nyana (kiri)
dan Ngurah
Kosala, usai
divonis di
Pengadilan
Tipikor
Denpasar,
kemarin.

an apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Sebelumnya sudah ada titipan dana, untuk pengembalian kerugian negara. Sebesar Rp 210 juta, yang menurut majelis itu menjadi pengembalian kerugian negara. Lantaran ada selisih, sisa dari dana Rp 210 juta dikembalikan ke terdakwa.

Sebelumnya Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 1,5 tahun. Selain itu juga menuntut terdakwa, agar didenda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Artinya jika tidak mampu membayar denda, hukuman ditambah 3 bulan.

Atas vonis ini, baik Jaksa ataupun terdakwa menyatakan pikir - pikir. Kasus ini berawal dari Proyek tahun 2012 Jalan Gajah Mada ditetapkan sebagai kawasan Heritage. Sehingga dilakukan penataan atas jalan ini, dengan merancang Jalan ini dengan penataan pedestrian yaitu proyek pavingisasi. Kemudian dianggarkan Rp 3.150.000.000, selanjutnya diproses tender. Salah satu pesertanya adalah PT Alit Wirajaya dan milik ter-

dakwa Alit Widhiadnyana. Dan akhirnya PT milik terdakwa ini yang menang, dengan penawaran Rp 2,5 miliar.

Tak hanya itu, selain memenangkan tender untuk menggarap proyek juga ditetapkan

konsultan pengawas. Yakni yang menjadi konsultan pengawas adalah, CV Inika Desain yang direktornya adalah Ngu-rah Kosala Cakrawerthi yang juga terdakwa dalam kasus ini.

Dalam pelaksanaan proyek

ini, tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak sesuai dengan Detail Engenering Design (DED), terjadi perubahan volume dengan tidak dipasangnya paving di atas jembatan Tukad Badung (Sungai Badung). Walaupun diabuatkan adendum atau perubahan perjanjian, dengan perjanjian tambah kurang Rp 536 juta lebih.

Atas pekerjaannya ini PT Alit Wirajaya telah menerima pembayaran sebanyak 3 kali yakni Rp 504 juta lebih, Rp 831 juta lebih dan Rp 1,1 miliar lebih. Setelah dipotong pajak total uang yang diterima Rp 1 miliar lebih. Dengan kondisi ini jumlah realisasi negara Rp 2,2 miliar, namun nilai fisik barang yang diterima oleh negara adalah Rp 2 miliar lebih. Sehingga negara dirugikan Rp 210. 541. 795, angka kerugian ini berdasarkan hasil audit BPKP. (art/han)



PROYEK PUSKESMAS

Siapkan Penalti Rp 17 Juta per Hari

MANGUPURA - Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Badung harap-harap cemas. Pasalnya, beberapa proyek besar di Badung terancam molor. Salah satunya proyek pembangunan Puskesmas Abiansemal I senilai Rp 17 miliar. Kepala DCK Kabupaten Badung Ni Putu Dessy Darmayanti mengaku proyek puskesmas memang tengah menjadi perhatian serius.

Pihaknya juga telah mengambil ancap-ancang menyiapkan sanksi penalti kepada rekanan jika tak sanggup menyelesaikan kontrak. Penalti yang akan diberikan berupa denda uang. Untuk proyek Puskesmas Abiansemal I jika telat, lanjut Dessy, denda sehari sebesar Rp 17 juta atau seperseribu dari nilai kontrak Rp 17 miliar. "Nanti tinggal menghitung berapa hari dia terlambat dikalikan seperseribu atau Rp 17 juta itu," papar Dessy kemarin (12/11).

Namun, pihaknya baru mulai menyusun penalti pada awal Desember atau sebelum proyek jatuh tempo. Berdasarkan kontrak, proyek berakhir pada tanggal 23 Desember. (san/yes)



Retribusi Tak Tembus Target

Diduga Bocor, Kendaraan Banyak yang Lolos

NEGARA - Harapan Pemkab Jembrana mendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi terminal manuver Gilimanuk, belum bisa terwujud sesuai target yang dipasang. Penyebabnya diduga karena terjadi kebocoran akibat ulah oknum-oknum petugas yang bertugas disana.

Rertibusi kendaraan yang masuk terminal manuver Gilimanuk sejak Minggu (13/5). Pemungutan retribusi parkir manuver yang menggunakan payung hukum Perda Jembrana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tersebut dikelola oleh perusahaan daerah (perusda) Jembrana. Setiap kendaraan yang masuk parkir manuver sebelum masuk pelabuhan Gilimanuk dikenakan tarif Rp 1.000 untuk sepeda motor Rp 2.000 untuk mobil pribadi atau sedan sejenis dan Rp 3.000 untuk kendaraan besar seperti truk, bus sedang dan bus besar. Pembagiannya 40 persen untuk Perusda dan

60 persen untuk Pemkab Jembrana. Namun sejak pungutan retribusi itu dilakukan sampai sekarang, target yang diberikan tidak pernah tercapai. Setoran yang masuk jauh di bawah target hingga puluhan juta setiap tahun. Tidak pernahnya pungutan retribusi itu diduga karena terjadi kebocoran akibat banyak kendaraan yang lolos tanpa masuk parkir manuver. Lolosnya kendaraan terutama bus AKAP dan travel tersebut diduga karena oknum petugas yang bertugas di pos pertigaan jalan masuk manuver. Sering terlihat oknum petugas disana sengaja mengarahkan bus AKAP dan travel lurus menuju pelabuhan melalui jalan di depan terminal Gilimanuk dan menerima uang dari sopir atau kernet. Padahal di pertigaan tersebut sudah ada rambu yang hanya membolehkan kendaraan dinas dan kendaraan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) saja yang boleh melintas. Sementara kendaraan lain harus masuk terminal manuver. Setiap hari ada duaratus lebih bus dan travel yang lolos langsung ke pelabuhan. "Memang retribusi dari terminal manuver realisasin-

ya dan tidak pernah mencapai target," ujar Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Pemkab Jembrana Dewa Gede Kusuma Antara, ketika dikonfirmasi, Kamis (12/11) kemarin. Menurut Antara, tahun 2014 lalu retribusi terminal manuver Gilimanuk ditarget Rp 1.730.089.000 dan terealisasi hanya Rp. 1.387.632.000. untuk tahun ini ditarget Rp 1.922.332.000 dan sampai September yang masuk baru sekitar Rp. 1 miliar. "Kita sempat tanyakan, alasannya katanya banyak kendaraan yang lolos. Kita sarankan agar disana lebih dimaksimalkan, karena kita pernah melakukan survey dari pukul 14.00 sampai pukul 00.00. ada sekitar 2000 kendaraan keluar Bali," ungkapnya.

Sementara itu Plt Direktur Perusda Jembrana I Made Sudantra, yang dikonfirmasi terpisah mengakui kalau retribusi parkir manuver memang paling jauh dari target. Sehingga dirinya kemudian melakukan evaluasi. "Seperti ada pembiaran kendaraan yang lolos ke pelabuhan. Dari pantauan saya sepuluh kendaraan yang akan menyeberang, lima dibiarkan lolos," tukas dia. (nom/gup)